

## ANALISIS RASIO KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN ENREKANG UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN ENREKANG TAHUN ANGGARAN 2019-2023

Rohani<sup>1</sup>, Rezki Fani<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Prodi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia

<sup>2</sup>Prodi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received June 25, 2025

Revised July 16, 2025

Accepted August 12, 2025

Available online November 1, 2025

#### Keywords:

Regional Financial Performance,  
Regional Financial Ratio

#### Paper type:

 Research paper

Please cite this article: Asriadi Arifin Adi, Dian Novianti, Trian Fisman Adisaputra "Manajemen Zakat Baznas" MONETA : Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah [ONLINE], Volume 01 Number 02 (May, 2023)

#### Cite this document:

Turabian 8th edition

#### \*Corresponding author

e-mail: [rohanhyanh@gmail.com](mailto:rohanhyanh@gmail.com)

### ABSTRACT

Regional financial ratio assessment can help improve transparency in regional financial management, by measuring and assessing financial performance objectively. Does the agency already have good or bad financial performance. This study uses a quantitative method with a descriptive approach, collecting data using documentation studies, and observations by analyzing financial performance based on the Budget Realization Report (LRA) using the independence ratio, effectiveness ratio, efficiency ratio and measuring with Share and Growth and regional financial capability maps. The results of this study indicate that the financial performance of the Enrekang Regency Government in 2019-2023 can be said to be not good, seen from the calculation of the three financial ratios, namely the independence ratio obtained an average of 7.98% which is included in the "very low" category and is included in the Instructive relationship pattern because it is between 0% -25%. Then the effectiveness ratio obtained an average of 57.65% which is included in the "ineffective" category because it is <60%. And for the results of the efficiency ratio calculation, an average of 106.89% was obtained which is included in the "inefficient" criteria because it is > 100%. Then, for the measurement of the results of the share and growth calculations, the average share was 7.44% and the average growth was 7.84%, which is included in the low category, and measured based on the quadrant method, the position of Enrekang Regency for 5 years was in quadrant IV, which is the worst condition.

**Abstrak:** Penilaian rasio keuangan daerah dapat membantu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, dengan mengukur dan menilai kinerja keuangan secara objektif. Apakah instansi tersebut sudah mempunyai kinerja keuangan yang baik atau buruk. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, mengumpulkan data menggunakan studi dokumentasi, dan observasi dengan menganalisis kinerja keuangan berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi dan mengukur dengan Share and Growth dan peta kemampuan keuangan daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintahan Kabupaten Enrekang pada tahun 2019-2023 dapat dikatakan tidak baik, dilihat dari perhitungan ketiga rasio keuangan yaitu rasio kemandirian diperoleh rata-rata 7,98% yang tergolong dalam kategori "rendah sekali" dan termasuk dalam pola hubungan Instruktif karena berada di antara 0%-25%. Kemudian rasio efektivitas diperoleh rata-rata 57,65% yang tergolong dalam kategori "tidak efektif" karena <60%. Dan untuk hasil perhitungan rasio efisiensi diperoleh rata-rata 106,89% yang tergolong dalam kriteria "tidak efisien" karena >100%. Kemudian untuk pengukuran dari hasil perhitungan share dan growth diperoleh rata-rata share yaitu 7,44% dan rata-rata growth yaitu 7,84% yang tersebut termasuk dalam kategori rendah, dan diukur berdasarkan metode kuadran, posisi kabupaten Enrekang selama 5 tahun berada pada kuadran IV yaitu kondisi paling buruk.

**Kata kunci:** Kinerja Keuangan Daerah, Rasio Keuangan Daerah.

## PENDAHULUAN

Menilai kinerja keuangan daerah memiliki peran penting dalam mengukur tingkat tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik. Kinerja pemerintah daerah menjadi hal utama dalam manajemen keuangan, karena mencerminkan kondisi finansial serta kapasitas pemerintah dalam menghimpun dan memanfaatkan dana untuk kepentingan pembangunan daerah (Haryani et al., 2021). Oleh sebab itu, analisis terhadap kinerja pemerintah daerah diperlukan guna melihat sejauh mana capaian yang telah diperoleh dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya, sebagai bentuk pelaporan kemajuan (*progress report*).

Penggunaan anggaran di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Enrekang menunjukkan pola yang berfluktuasi atau tidak tetap. Setiap analisis selalu menampilkan perubahan yang menarik untuk diteliti. Perubahan serta pertumbuhan dalam penggunaan anggaran menjadi faktor penting dalam mengevaluasi kinerja pada instansi. Sebagai salah satu wilayah yang sedang berkembang di Sulawesi Selatan, Kabupaten Enrekang terus berusaha melakukan pembangunan guna mewujudkan kondisi yang maju, aman, dan sejahtera melalui pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan bertanggung jawab. Namun, salah satu tantangan yang kerap dihadapi pemerintah Kabupaten Enrekang adalah anggaran yang sering kali disusun lebih rendah dibandingkan dengan potensi pendapatan yang sebenarnya bisa diperoleh (Fitriyani et al., 2024). Dengan demikian, analisis rasio keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Enrekang berperan penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Melalui penggunaan rasio keuangan, peneliti dapat secara objektif mengevaluasi kinerja keuangan daerah tersebut, termasuk memastikan apakah pemanfaatan dana APBD telah sesuai dengan rencana dan kebutuhan masyarakat. Fokus analisis dilakukan pada data laporan realisasi anggaran tahun 2019 hingga 2023, karena periode tersebut merupakan laporan realisasi anggaran

terbaru. Selain itu, analisis kinerja keuangan daerah ini berfungsi sebagai alat bantu untuk mempermudah para pemangku kepentingan dalam memahami dan menginterpretasi laporan realisasi anggaran.

## TEORI

### A. Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan daerah mencerminkan realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan metode akrual. Kinerja keuangan sendiri adalah ukuran kinerja yang menggunakan indikator-indikator finansial. Analisis terhadap kinerja keuangan pada dasarnya bertujuan untuk mengevaluasi kinerja masa lalu dengan melakukan berbagai pemeriksaan sehingga dapat diperoleh gambaran posisi keuangan yang mencerminkan realisasi entitas serta potensi kinerja yang berkelanjutan (Halim & Ahmad, 2016). Pengukuran kinerja adalah proses analisis atau penilaian atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan organisasi berdasarkan tujuan, target, standar, dan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Hasil dari pengukuran ini nantinya akan menjadi acuan dalam menetapkan standar kinerja untuk periode yang akan datang (Nasir et al., 2023).

Sistem pengukuran kinerja di sektor publik dirancang untuk membantu manajer publik dalam menilai pencapaian strategi menggunakan indikator finansial maupun nonfinansial. Pengukuran ini memiliki tiga tujuan utama. Pertama, untuk membantu meningkatkan kinerja pemerintah dengan memfokuskan perhatian pada tujuan dan sasaran program dari masing-masing unit kerja, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi publik dalam memberikan layanan. Kedua, sebagai dasar dalam pengalokasian sumber daya dan pengambilan keputusan. Ketiga, bertujuan untuk mewujudkan akuntabilitas publik sekaligus memperbaiki komunikasi antar lembaga (Adisaputra, 2023). Hasil pengukuran kinerja yang telah dilakukan menjadi dasar dalam menetapkan target pencapaian untuk periode selanjutnya.

### B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi landasan pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran, yaitu dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), kepala daerah menetapkan prioritas serta batas maksimal anggaran yang akan menjadi acuan dalam pembuatan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja (RKASK) di setiap perangkat daerah. Berdasarkan prioritas dan batas anggaran tersebut, kepala satuan kerja perangkat daerah kemudian menyusun RKASK dengan pendekatan berdasarkan target prestasi kerja yang akan dicapai (Djanegara, 2024). Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja perangkat daerah diserahkan oleh kepala pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan

dasar untuk menyusun rancangan peraturan daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun anggaran berikutnya.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan yang menyajikan ringkasan mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah (Djanegara, 2024). Laporan ini menggambarkan perbandingan antara anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi yang terjadi dalam satu periode pelaporan.

### **C. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah**

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Selanjutnya, pengukuran kinerja diartikan sebagai indikator baik finansial maupun non-finansial yang mencerminkan pelaksanaan tugas atau hasil yang diperoleh dari suatu aktivitas dalam sebuah unit organisasi. Kinerja keuangan merupakan ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan (Patarai, 2017). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan pemerintah terdiri atas laporan anggaran, laporan keuangan, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan anggaran meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan laporan perubahan saldo anggaran (SAL). Sedangkan laporan keuangan mencakup neraca, Laporan Operasi (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan laporan arus kas (Arifin1 et al., 2023). CaLK berfungsi sebagai penjelasan rinci yang melengkapi laporan anggaran dan laporan keuangan, serta menjadi bagian integral dari kedua laporan tersebut

Analisis kinerja keuangan pada dasarnya bertujuan untuk mengevaluasi pencapaian kinerja di periode sebelumnya melalui berbagai metode analisis, sehingga dapat diperoleh gambaran posisi keuangan yang mencerminkan kondisi nyata entitas serta potensi kinerja yang berkelanjutan di masa mendatang (Adisaputra, 2022). Analisis rasio keuangan berfungsi sebagai alat untuk menilai kinerja keuangan serta kapasitas keuangan suatu daerah. Kinerja keuangan dianalisis dengan mengidentifikasi karakteristik keuangan yang tercermin dalam laporan keuangan yang tersedia. Terdapat beberapa metode dalam mengukur kinerja keuangan daerah, di antaranya adalah penghitungan rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi (Sudianto et al., 2022). Adapun rasio tersebut yaitu sebagai berikut:

#### **a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Rasio kemandirian menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber keuangan yang diperlukan daerah. Semakin rendah rasio kemandirian keuangan daerah, maka semakin tinggi

ketergantungannya terhadap dana dari luar. Sebaliknya semakin tinggi rasio keuangan daerah, maka semakin kecil ketergantungannya terhadap dana bantuan luar daerah (Yuesti et al., 2025). Adapun rumusnya yaitu sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

b. Rasio Efektivitas keuangan Daerah

Rasio efektifitas pendapatan asli daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektifitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik (Dewi et al., 2021). Salah satu contoh untuk menghitung efektivitas keuangan daerah, dapat digunakan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

c. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

ratio efisiensi pendapatan asli daerah merupakan rasio yang digunakan untuk menggambarkan sejauh mana kemampuan pemerintah dalam mengoptimalkan pengeluaran biaya yang dikeluarkan. Semakin rendah nilai rasio efisiensi, maka menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah dalam mengefisienkan biaya semakin baik(Irwandi & Arifin, Asriadi, 2023). Rasio ini menggambarkan keterkaitan antara besaran biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang berhasil dicapai. Adapun rumusnya sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

## D. Analisis kemampuan keuangan daerah

Tingkat kemandirian keuangan daerah dapat diukur dengan menggunakan rasio yang membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah. Rasio ini menggambarkan kemampuan PAD dalam membiayai belanja daerah yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pelayanan publik. Daerah yang memiliki rasio kemandirian keuangan rendah cenderung lebih bergantung pada

pendanaan dari pemerintah pusat (Harefa et al., 2018). Namun demikian, peningkatan rasio tersebut dapat memiliki makna negatif apabila sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pendapatan bunga, yang mencerminkan besarnya dana pemerintah daerah yang disimpan di bank tanpa digunakan untuk membiayai pembangunan daerah.

Menghitung kemampuan keuangan daerah diawali dengan perhitungan *share* & *growth* kemudian mengklasifikasikan dengan pemetaan kemampuan keuangan daerah berdasarkan metode kuadran (Makmur et al., 2023). Adapun cara menghitung *share* & *growth* adalah sebagai berikut:

a. Perhitungan dan Analisis *Share and Growth*

$$Share = \frac{PAD}{Total Belanja} \times 100\%$$

$$Growth = \frac{PAD_i - PAD_{i-1}}{PAD_{i-1}} \times 100\%$$

b. Peta Kemampuan Keuangan



Kuadran	Kondisi
I	Kondisi paling ideal, terjadi ketika Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan kontribusi signifikan terhadap total belanja daerah, serta daerah tersebut memiliki kapasitas yang baik dalam mengembangkan potensi lokalnya. Hal ini tercermin dari nilai <i>Share</i> dan <i>Growth</i> yang tinggi.
II	Kondisi ini belum ideal, namun menunjukkan bahwa daerah memiliki potensi lokal yang masih dapat

	dikembangkan. Hal ini ditunjukkan oleh kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total belanja yang masih rendah, namun disertai dengan tingkat pertumbuhan (growth) PAD yang tinggi, sehingga terdapat peluang bagi PAD untuk memberikan peran yang lebih besar dalam pembiayaan belanja daerah di masa mendatang.
III	Kondisi ini juga belum ideal. Meskipun kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap keseluruhan belanja daerah tergolong tinggi, namun tingkat pertumbuhan PAD relatif rendah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa meskipun PAD memegang peranan penting dalam struktur pembiayaan belanja daerah, peluang untuk meningkatkan peran tersebut di masa mendatang menjadi terbatas akibat laju pertumbuhannya yang rendah.
IV	Kondisi ini paling buruk. Hal ini ditandai dengan rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total belanja daerah, serta lemahnya tingkat pertumbuhan PAD. Selain itu, daerah yang berada dalam kondisi ini umumnya belum mampu mengoptimalkan potensi sumber daya lokalnya untuk mendukung kemandirian fiskal, sehingga ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat masih sangat tinggi.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriprif, mengumpulkan data menggunakan studi dokumentasi, observasi dengan menganalisis kinerja keuangan berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) selama 5 tahun (2019-2023). Penelitian ini dilakukan di Badan Keuangan Dan Asset Daerah (BKAD) Kabupaten Enrekang. Waktu penelitian dilakukan pada tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan 20 April 2025.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Kinerja Keuangan Daerah

#### a. Rasio Kemandirian

Tahun Anggaran	Rasio Kemandirian	Kemampuan Keuangan
2019	6,88%	Rendah sekali

<b>2020</b>	7,10%	Rendah sekali
<b>2021</b>	7,16%	Rendah sekali
<b>2022</b>	10,41%	Rendah sekali
<b>2023</b>	8,34%	Rendah sekali
<b>Rata-rata</b>	<b>7,984%</b>	<b>Rendah sekali</b>

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan rasio kemandirian di tahun 2019 yaitu 6,88% , ditahun 2020 mengalami kenaikan 0,22% menjadi 7,10%, kemudian dari tahun 2020-2021 masih mengalami kenaikan sebesar 0,6 % sehingga menjadi 7,16%, di tahun 2022 juga masih mengalami kenaikan sebesar 3,25% sehingga menjadi 10,41% dan di tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 2,07% menjadi 8,34%. Dengan rata-rata rasio kemandirian kabupaten Enrekang pada tahun 2019-2023 yaitu sebesar 7,98%. Ini menunjukkan bahwa pola hubungan kabupaten Enrekang sebagai pemerintah daerah dengan pemerintah pusat adalah kemampuan keuangan daerah rendah sekali dengan pola hubungan tergolong instruktif.

b. Rasio Efektivitas

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Rasio Efektivitas</b>	<b>Kriteria Pengukuran</b>
2019	54,26%	Tidak Efektif
2020	65,77%	Kurang Efektif
2021	73,46%	Kurang Efektif
2022	58,43%	Tidak Efektif
2023	36,36%	Tidak Efektif
<b>Rata-rata</b>	<b>57,65%</b>	<b>Tidak Efektif</b>

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk rasio efektivitas PAD pertumbuhan tingkat kinerja keuangan di tahun 2019 yaitu 54,26%, ditahun 2020 mengalami kenaikan 11,51% yaitu menjadi 65,77%, kemudian dari tahun 2020-2021 masih mengalami kenaikan sebesar 7,69% sehingga menjadi 73,46%, di tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 15,03% sehingga menjadi 58,43%, dan di tahun 2023 juga mengalami penurunan sebesar 22,07% sehingga menjadi 36,36%. Dengan rata-rata rasio efektivitas PAD kabupaten Enrekang pada tahun 2019-2023 yaitu 57,65%. Ini menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten Enrekang tidak efektif dalam mengelola PADnya.

c. Rasio Efisiensi

Tahun Anggaran	Rasio Efisiensi	Kinerja
2019	98,68%	Kurang Efisien
2020	100,16%	Tidak Efisien
2021	108,97%	Tidak Efisien
2022	127,44%	Tidak Efisien
2023	99,24%	Kurang Efisien
<b>Rata-rata</b>	<b>106,89%</b>	<b>Tidak Efisien</b>

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk rasio efisiensi pemerintahan kabupaten Enrekang di tahun 2019 yaitu 98,68%, ditahun 2020 mengalami kenaikan 1,48% yaitu menjadi 100,16%, kemudian dari tahun 2020-2021 masih mengalami kenaikan sebesar 8,81% sehingga menjadi 108,97%, di tahun 2022 masih mengalami peningkatan 18,47% sehingga menjadi 127,44%, dan di tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 28,2% sehingga menjadi 99,24%. Dengan rata-rata rasio efisiensi kabupaten Enrekang pada tahun 2019-2023 yaitu 106,89%. Nilai tersebut dalam kriteria tidak efisien karena berada di >100%.

### Analisis Kemampuan Keuangan Daerah

a. *Share and Growth*

Tahun Anggaran	Share	Growth
2019	6,97%	10,89%
2020	7,10%	6,83%
2021	6,57%	-6,31%
2022	8,16%	39,55%
2023	8,41%	-11,72%
<b>Rata-rata</b>	<b>7,44%</b>	<b>7,848%</b>

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa perhitungan *share* pada tahun 2019 di peroleh 6,97%, pada tahun 2020 mengalami sedikit kenaikan 0,13% sehingga menjadi 7,10%, pada tahun 2021 mengalami penurunan 0,39 sehingga menjadi 6,57%, pada tahun 2022 kembali mengalami kenaikan 1,59% sehingga menjadi 8,16%, dan pada tahun 2023 masih mengalami sedikit kenaikan 0,25% sehingga menjadi 8,41%. Adapun rata-rata pada perhitungan *Share* yang diperoleh dari tahun 2019-2023 yaitu 7,44%. Kemudian pada perhitungan *Growth* pada tahun 2019 diperoleh 10,89%, pada tahun 2020 mengalami penurunan 4,06% sehingga menjadi 6,83%, pada tahun 2021 masih mengalami penurunan 13,14% sehingga menjadi -6,31%, pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 45,86% sehingga menjadi 39,55%, kemudian pada tahun 2023

kembali mengalami penurunan sebesar 51,27% sehingga menjadi -11,72%. Adapun rata-rata perhitungan *Growth* dari tahun 2019-2023 yang di peroleh yaitu 7,848%.

#### b. Peta Kemampuan Keuangan

Hasil perhitungan *share and growth* Laporan Realisasi Anggaran pemerintahan kabupaten Enrekang tahun anggaran 2019-2023, maka diperoleh data rata-rata *share* sebesar 7,44% sedangkan untuk perhitungan *growth* diperoleh rata-rata sebesar 7,84%. Hal ini menunjukkan bahwa peta kemampuan keuangan daerah pemerintahan kabupaten Enrekang dari hasil perhitungan *share* dan *growth* berdasarkan metode kuadran, posisi kabupaten Enrekang berada pada kuadran IV, yaitu *share* rendah dan *growth* rendah. Hal ini sejalan dengan teori wahyu hidayat bahwa dalam kriteria pada klasifikasi status kemampuan keuangan daerah berdasarkan metode kuadran IV merupakan kondisi paling buruk dimana Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mengalami peran yang besar dalam total belanja, dan daerah belum mempunyai kemampuan mengembangkan potensi lokal. Sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total belanja dan pertumbuhan PAD terhadap total belanja dan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah. Ini berarti Kondisi kemampuan keuangan Kabupaten Enrekang berada pada posisi yang buruk karena peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum begitu besar dalam belanja daerah. Sementara itu daerah belum mampu menggenjot pendapatan asli daerahnya secara optimal.

## KESIMPULAN

Kinerja keuangan pemerintahan kabupaten Enrekang tahun anggaran 2019-2023 dapat dikatakan tidak baik, dapat dilihat dari perhitungan ketiga rasio keuangan yaitu rasio kemandirian, efektivitas dan efisiensi. Dari rasio kemandirian diperoleh rata-rata 7,98% yang tergolong dalam kategori "rendah sekali", dan termasuk dalam pola hubungan instruktif karena berada di antara 0%-25%. Kemudian Rasio efektivitas diperoleh rata-rata 57,65% yang tergolong dalam kategori "tidak efektif" karena <60%. Dan untuk hasil perhitungan Rasio efisiensi diperoleh rata-rata 106,89% yang tergolong dalam kriteria "tidak efisien" karena >100%.

Kemampuan keuangan daerah pemerintahan kabupaten Enrekang yang diukur melalui *Share* dan *Growth* yang kemudian di klasifikasikan pada peta kemampuan keuangan daerah selama tahun anggaran 2019-2023. Dari hasil perhitungan *share* dan *growth* tahun anggaran 2013-2023 diperoleh rata-rata *share* yaitu 7,44% dan rata-rata *growth* yaitu 7,84%. Dari hasil rata-rata perhitungan *share* dan *growth* tersebut termasuk dalam kategori rendah, kemudian jika diukur berdasarkan metode kuadran, posisi kabupaten Enrekang berada pada kuadran IV, Kondisi ini paling buruk dimana Peran

PAD belum mengalami peran yang besar dalam total belanja, dan daerah belum mempunyai kemampuan mengembangkan potensi lokal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul halim. *Manajemen Keuangan Sektor Public*. Jakarta: Salemba Empat, 2016.
- Adisaputra, T. F. (2022). *Manajemen Investasi Syariah* (Vol. 1). LPP Balai Insan Cendekia.
- Adisaputra, T. F. (2023). *POTRET ANGGARAN RESPONSIF GENDER DALAM MENANGANI KEMISKINAN DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG* *Portrait of Gender Responsive Budget in Addressing Poverty in Sidenreng Rappang District*. 6(1), 64–80.
- Arifin, A., Novianti, D., & Fisman, T. (n.d.). *MONETA : Jurnal Manajemen & Keuangan Syariah MANAJEMEN ZAKAT BAZNAS*. 1–11. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/Moneta>
- Dewi, M. G., Hakim, M. Z., & Abbas, D. S. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Kebijakan Hutang Dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Kebijakan Dividen (Pada Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Tahun 2017-2019). *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Bisnis*, 110–120.
- Djanegara, H. M. (2024). IMPLEMENTASI PERATURAN NAGARI NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG GOTONG ROYONG DAN SWADAYA MASYARAKAT DI NAGARI TANJUNG HARO SIKABU-KABU PADANG PANJANG. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 10(3), 126–137.
- Fitriyani, N., Dunakhir, S., & Afiah, N. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Pada Badan Keuangan Dan Asset Daerah (BKAD) Kabupaten Enrekang. *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 2(4), 410–426.
- Gusman, E, and Z Arman. *Pelaksanaan Fungsi Anggaran Oleh Legislatif Di Daerah*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024.
- Harahap, Heri Faisal. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah." *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 4, no. 1 (2020).
- Halim, A. *Akuntansi Keuangan Daerah* (Ed. 3) *Koran 2019*. Penerbit Salemba, n.d.
- Halim, R. A., & Ahmad, H. (2016). Distributed leadership, contextual factor and teachers' self-efficacy in Malaysia. *Educational Leader (Pemimpin Pendidikan)*, 4, 31–38.
- Harefa, M., Permana, S. H., Mangeswuri, D. R., & Meilani, H. (2018). *Optimalisasi kebijakan penerimaan daerah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Haryani. "Analisis Kemandirian Dan Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen." *Jurnal Kebangsaan* 5, no. 9 (2019): 50–54.
- Haryani, E., Ahmad, S., & Aradea, R. (2021). Analisis faktor-faktor penyebab

- rendahnya daya serap siswa pada pelajaran akuntansi. *Journal of Education Research*, 2(2), 82–88.
- Irwandi, & Arifin, Asriadi, T. F. A. (2023). *Implementasi Produk Kpr (Kredit Pemilikan Rumah) Bank Syariah Indonesia (Bsi) Parepare*. 2(3), 272–282.  
<http://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/bnigriyaibhasanah>
- Indriani, E A E. *Ekonomi Dan Akuntansi: Membina Kompetensi Ekonomi*. PT Grafindo Media Pratama, n.d.
- Jaka Winarna, M.S.A.C.A. *Informasi Laporan Keuangan Dan Kinerja Pemerintah Daerah*. Deepublish, 2024.
- Makmur, M., Taufq, M., & Adisaputra, T. F. (2023). Pengaruh BI Rate Dan Nilai Tukar Mata Uang Terhadap Profitabilitas Bnak Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Moneta : Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*, 02(01), 230–232. <https://doi.org/10.35905/moneta.v2i1.5649>
- Nasir, N. N. A., Hassan, S. H. M., Mustapha, R., & Jusoh, M. K. A. (2023). Islamic Financial Literacy in Malaysia: A Bibliometric Analysis. *International Journal of Islamic Theology & Civilization (E-ISSN-3009-1551)*, 1(1), 1–9.
- Patarai, D. R. M. I. (2017). *Kinerja Keuangan Daerah* (Vol. 2). A. EMIL MATTOTORANG.
- Sudianto, Suyatni, & Mulyadi. (2022). *MANAJEMEN KEUANGAN*. Trussmedia Grafika.
- YUESTI, A., PUTRI, Y. K. W., PUTRA, I. P. D., MENES, C. C., & MADRIGAL, D. V. (2025). Audit Quality and Its Determinants: Evidence from Food and Beverage Firms in Indonesia. *Journal of Entrepreneurial and Business Diversity*, 3(1), 371–377.